



## Analisis Intervensi Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pariwisata Berkelanjutan Di Kecamatan Tarutung Tapanuli Utara

Winda Lovika Putri Silalahi<sup>1</sup>, Indah Amelia V. Simanullang<sup>2</sup>, Isak Roiman Lumbantobing<sup>3</sup>, Hiyos Fiter Sababalat<sup>4</sup>, Elisabet Sitompul<sup>5</sup>, Frando Sihombing<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Prodi PBK FISHK Insitut Agama Kristen Negeri Tarutung, Indonesia

<sup>6</sup>Prodi Teologi STT Siarnauli Tapanuli Tengah, Indonesia

e-mail: [silalahiwinda55@gmail.com](mailto:silalahiwinda55@gmail.com), [manullangindah57@gmail.com](mailto:manullangindah57@gmail.com), [isaktobing03@gmail.com](mailto:isaktobing03@gmail.com), [hiyosfittersababalat@gmail.com](mailto:hiyosfittersababalat@gmail.com), [elisabetsitompul@gmail.com](mailto:elisabetsitompul@gmail.com), [sihombingfrando@gmail.com](mailto:sihombingfrando@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 08, 2026

Accepted June 10, 2026

#### Keywords:

Government Intervention, Sustainable Tourism, Collaborative Governance, North Tapanuli, Cultural Tourism.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the forms of intervention by the North Tapanuli Regional Government in tourism sector development, to examine the implementation of local government policies in promoting sustainable tourism, and to identify the supporting and inhibiting factors involved. This research adopts a qualitative approach using observation, in-depth interviews, and documentation from informants representing the Tourism Office, Dekranasda, local MSME actors, community members, and academics. The findings reveal that government intervention is multidimensional, encompassing physical infrastructure development, protective regulations, MSME capacity facilitation, and culture-based tourism promotion. The implementation of sustainable tourism policies has yielded positive impacts across three key dimensions: economic (multiplier effect and urbanization reduction), socio-cultural (revitalization of Ulos weaving and Batak Toba arts), and environmental (community eco-literacy). Supporting factors include rich tourism potential, the spirit of gotong royong (mutual cooperation), and collaborative governance synergy. Inhibiting factors include budget constraints, suboptimal inter-agency coordination, and limited tourism human resource quality in some areas.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 08, 2026

Accepted June 10, 2026

#### Kata Kunci:

Intervensi Pemerintah, Pariwisata Berkelanjutan, Collaborative Governance, Tapanuli Utara, Pariwisata Budaya.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk intervensi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengembangan sektor pariwisata, menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pariwisata berkelanjutan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas Pariwisata, Dekranasda, pelaku usaha UMKM, masyarakat lokal dan kalangan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah bersifat multidimensional mencakup pembangunan infrastruktur fisik, regulasi protektif, fasilitasi kapasitas UMKM, serta promosi wisata berbasis budaya. Implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan telah memberikan dampak positif pada tiga dimensi utama: ekonomi (*multiplier effect* dan reduksi urbanisasi), sosial-budaya (revitalisasi Tenun Ulos dan kesenian Batak Toba), serta



lingkungan (*eco-literacy* masyarakat). Faktor pendukung mencakup kekayaan potensi wisata, nilai gotong royong dan sinergi collaborative governance. Faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga yang belum optimal dan rendahnya kualitas SDM pariwisata di sebagian wilayah.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Winda Lovika Putri Silalahi<sup>1</sup>  
Insitut Agama Kristen Negeri Tarutung  
e-mail: [silalahiwinda55@gmail.com](mailto:silalahiwinda55@gmail.com)

---

**PENDAHULUAN**

Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi sektor yang semakin strategis dalam struktur pembangunan daerah. Posisi kabupaten ini tidak dapat dilepaskan dari letaknya yang berada dalam Kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia<sup>1</sup>. Status tersebut menempatkan Tapanuli Utara dalam kerangka kebijakan nasional yang mendorong percepatan pembangunan pariwisata berbasis daya saing dan keberlanjutan.

Daerah ini memiliki kombinasi daya tarik yang khas, meliputi wisata religi Salib Kasih yang bernilai historis dan spiritual bagi masyarakat Kristen Batak, panorama alam Pegunungan Hutaginjang yang menyuguhkan lanskap Danau Toba dari ketinggian, serta sumber Air Panas Aek Situmandi yang bernilai ekologis dan terapeutik<sup>2</sup>. Kebudayaan Batak yang hidup dalam praktik sosial masyarakat melalui adat, ritual dan kesenian menjadi modal sosial yang memperkaya pengalaman wisata.

Pasca pandemi COVID-19, sektor pariwisata di Sumatera Utara menunjukkan tren pemulihan yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik mencatat peningkatan kunjungan wisatawan nusantara sejak tahun 2022 hingga 2024<sup>3</sup>. Beberapa daerah di kawasan Danau Toba bahkan mengalami pertumbuhan kunjungan yang cukup tinggi dalam satu tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi, namun juga menuntut kesiapan tata kelola yang adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan<sup>4</sup>.

Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih ditemukan di lapangan, seperti pengelolaan sampah yang belum optimal, keterbatasan fasilitas sanitasi, pengawasan usaha wisata yang belum maksimal, serta partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan<sup>5</sup>. Tinjauan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian

---

<sup>1</sup> Rotua Kristin and Rudi Salam, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Alam Dan Budaya Di Kabupaten Tapanuli Utara" 4, no. 1 (2016): 79–96.

<sup>2</sup> Bejo Mulyadi and Zulkhaidir Pohan, "No Title" 10, no. 1 (2022): 47–66.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, "Statistik Pariwisata Sumatera Utara 2024

<sup>4</sup> Ahkamil Hakim and Kata Kunci, "Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kawasan Danau Toba" 7, no. 1 (2024): 419–33.

<sup>5</sup> Kadek Surya Andika Putra, Tantangan Pengembangan, Pariwisata Danau, and Toba Di, "Jurnal Pacta Sunt Servanda" 4 (2023): 31–38.



mengenai peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata masih terbatas pada aspek promosi dan pengembangan potensi wisata secara umum dan belum banyak yang menganalisis bentuk, strategi, serta efektivitas intervensi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara komprehensif dan integratif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menetapkan fokus permasalahan utama yang berpusat pada tiga pilar krusial, yaitu kontribusi dan bentuk intervensi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memajukan sektor pariwisata, strategi implementasi kebijakan lokal guna mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, serta identifikasi komprehensif terhadap faktor pendukung dan penghambat operasionalisasi intervensi tersebut. Ketiga aspek fundamental ini dibedah secara mendalam untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas regulasi, tantangan struktural, dan proyeksi keberlanjutan sektor pariwisata dalam tatanan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat lokal.

### 1. Teori Intervensi Pemerintah dalam Pariwisata

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur, mengarahkan, serta mengendalikan pembangunan sektor pariwisata melalui kebijakan publik<sup>6</sup>. Intervensi pemerintah diperlukan ketika terjadi kegagalan pasar, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, atau potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata. Bentuk intervensi dapat mencakup penyusunan kebijakan dan regulasi, pembangunan infrastruktur, promosi destinasi, pengawasan usaha wisata, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan intervensi tersebut, pemerintah berperan sebagai pengarah sistem (*system steering*) yang memastikan pembangunan pariwisata selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Hall (2008) memperluas pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintah menjalankan fungsi perencanaan, regulasi, fasilitasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan<sup>7</sup>. Melalui fungsi-fungsi ini, pemerintah memastikan pengembangan pariwisata berjalan secara terarah, terorganisasi, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal.

### 2. Teori Pariwisata Berkelanjutan

Hunter menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat<sup>8</sup>. Beberapa prinsip utamanya meliputi pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, pelestarian nilai budaya dan tradisi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. *United Nations World Tourism Organization* memperkuat konsep ini dengan menekankan bahwa pengembangan pariwisata harus mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam menikmati sumber daya yang sama<sup>9</sup>. Tujuan penerapan pariwisata berkelanjutan mencakup optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian lingkungan dan sumber daya alam, konservasi nilai budaya, serta peningkatan kualitas pengalaman wisatawan.

<sup>6</sup> Dianne Dredge dan John Jenkins, *Tourism Planning and Policy*, (Australia: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 12–18.

<sup>7</sup> C. Michael Hall, *Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships*, 2nd Edition, (England: Pearson Education, 2008), hlm. 220–230.

<sup>8</sup> Colin Hunter, “Sustainable Tourism as an Adaptive Paradigm,” *Annals of Tourism Research*, Vol. 24 No. 4, 1997, hlm. 850–867.

<sup>9</sup> United Nations World Tourism Organization, *Sustainable Development of Tourism Programme*, 2015.



### 3. Teori Collaborative Governance

Bramwell dan Lane (2011) menyatakan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat lokal, dalam kerangka collaborative governance atau tata kelola kolaboratif. Prinsip-prinsipnya mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, kerja sama pemerintah dan sektor swasta, transparansi kebijakan, serta koordinasi antar lembaga.

Ansell dan Gash (2008) mengembangkan model collaborative governance yang menekankan dialog antar pemangku kepentingan, kepercayaan antar pihak, komitmen terhadap tujuan bersama dan proses pengambilan keputusan secara kolektif. Dalam konteks pariwisata, model ini memungkinkan pemerintah, masyarakat lokal dan pelaku usaha bekerja sama dalam mengelola destinasi wisata secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengkajian pengalaman, pandangan dan interaksi yang terjadi di masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2026, dengan tahapan: studi literatur dan penyusunan instrumen, observasi dan wawancara awal, pengumpulan data lapangan, serta analisis data dan penyusunan laporan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, terdiri dari: (1) pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pariwisata; (2) pengurus Dekranasda sebagai lembaga pembina kerajinan tradisional; (3) pelaku usaha UMKM pariwisata yang terlibat langsung dalam ekosistem wisata; (4) masyarakat lokal sekitar destinasi wisata; dan (5) mahasiswa/akademisi bidang pariwisata sebagai representasi kelompok intelektual.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap kondisi destinasi wisata dan aktivitas masyarakat, wawancara mendalam dengan informan, serta dokumentasi melalui laporan kegiatan pariwisata, arsip pemerintah dan data statistik. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Tarutung merupakan Ibu kota Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten ini merupakan bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas oleh pemerintah pusat.

Masyarakat Tapanuli Utara didominasi etnis Batak Toba yang masih menjunjung tinggi nilai adat, tradisi dan budaya lokal, tercermin dalam upacara adat, kegiatan keagamaan, serta kesenian tradisional. Secara ekonomi, mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian, peternakan dan perdagangan, dengan komoditas unggulan padi, kopi, jagung dan hortikultura. Sektor pariwisata dalam beberapa tahun terakhir mulai berkembang menjadi sektor potensial yang mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat.

Destinasi wisata unggulan mencakup Salib Kasih (wisata religi bernilai historis-spiritual), Hutaginjang (panorama Danau Toba dari ketinggian) dan Air Panas Sipoholon



(wisata alam terapeutik). Kekayaan budaya Batak Toba yang masih hidup dalam praktik sosial masyarakat menjadi daya tarik wisata budaya yang kuat. Namun, pengembangan pariwisata masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang belum optimal dan belum meratanya promosi wisata digital.

## 1. Bentuk Intervensi Pemerintah Daerah

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari empat kelompok informan, intervensi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengembangan pariwisata dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama:

Pertama, pembangunan infrastruktur dan sarana. Pemerintah membangun dan memperbaiki jalan menuju destinasi wisata (Salib Kasih, Muara), menyediakan fasilitas sanitasi, gazebo, lampu jalan, serta pusat informasi wisata dengan etalase khusus produk UMKM lokal<sup>10</sup>. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan mobilitas wisatawan, tetapi juga menciptakan aksesibilitas ekonomi yang menghubungkan produsen lokal dengan wisatawan.<sup>11</sup>

Kedua, regulasi sebagai instrumen proteksi. Pemerintah menyusun regulasi zonasi dagang yang mewajibkan toko oleh-oleh di kawasan wisata memprioritaskan produk asli Tapanuli Utara<sup>12</sup>, serta memfasilitasi pengurusan izin P-IRT dan sertifikasi Halal bagi UMKM<sup>13</sup>. Kebijakan penetapan harga dan zonasi area jualan juga diterapkan untuk memitigasi praktik eksploitasi harga yang dapat merusak reputasi destinasi<sup>14</sup>.

Ketiga, fasilitasi kapasitas dan pemberdayaan. Program pendampingan teknis, pelatihan hospitality dan sosialisasi Sadar Wisata dilaksanakan secara rutin<sup>15</sup>. Pemerintah juga bertindak sebagai *off-taker* produk UMKM lokal dengan memesan produk sebagai konsumsi resmi kunjungan pejabat dan kegiatan pariwisata daerah. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi<sup>16</sup>.

Keempat, promosi dan pemasaran berbasis budaya. Pemerintah menyelenggarakan event budaya tahunan seperti Festival Danau Toba, mengembangkan promosi digital, serta mendorong pembangunan destinasi berdasarkan *Integrated Tourism Master Plan* yang menghubungkan titik-titik wisata dalam satu sirkuit perjalanan<sup>17</sup>.

## 2. Implementasi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan

Implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Utara menghasilkan dampak pada tiga dimensi: Dimensi ekonomi. Pariwisata berfungsi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi lokal yang menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*)<sup>18</sup>. Pendapatan dari wisatawan terdistribusi secara vertikal (penyerapan tenaga kerja) dan

<sup>10</sup> Mulyadi and Pohan, "No Title."

<sup>11</sup> Yoeti Oka A., *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 45–52.

<sup>12</sup> Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 4 No. 1, 2016.

<sup>13</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Pedoman Pengembangan UMKM Pariwisata Berkelanjutan*, 2021.

<sup>14</sup> Kadek Surya Andika Putra, Pengembangan, Danau, and Di, "Jurnal Pacta Sunt Servanda."

<sup>15</sup> United Nations World Tourism Organization, *Tourism and Local Community Development*, 2018.

<sup>16</sup> Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, *Pedoman Kelompok Sadar Wisata dan Sapta Pesona*, 2012

<sup>17</sup> Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, *Integrated Tourism Master Plan Danau Toba*, 2020.

<sup>18</sup> Yoeti Oka A., *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 67–70.



horizontal (rantai pasok bahan baku lokal). Pada musim festival, pesanan UMKM dapat meningkat dua kali lipat. Sektor pariwisata juga berhasil menekan laju urbanisasi pemuda, yang kini dapat membuka warung kopi, jasa fotografi dan usaha parkir di sekitar destinasi<sup>19</sup>. Komoditas pertanian lokal seperti nanas dan jeruk terserap langsung oleh pasar wisatawan secara *on-site*. Mahasiswa mencatat bahwa UMKM lokal cukup mendominasi rantai pasok, meminimalkan *economic leakage*.

Dimensi sosial-budaya. Pariwisata memicu revitalisasi budaya melalui komodifikasi positif. Kesenian tradisional Batak Toba kembali dihidupkan dalam atraksi wisata, memperkuat kohesi sosial dan kebanggaan identitas lokal. Dekranasda menjaga orisinalitas motif Tenun Ulos dan melarang modifikasi yang menghilangkan filosofi dasarnya, memposisikan konservasi budaya sebagai keunggulan kompetitif destinasi. UMKM mengintegrasikan elemen budaya Batak seperti motif gorga pada kemasan produk sebagai strategi branding yang sekaligus melestarikan identitas daerah.

Dimensi lingkungan. Terjadi internalisasi prinsip *eco-literacy* di tingkat akar rumput. Masyarakat memahami bahwa kelestarian ekosistem merupakan aset ekonomi vital (*natural capital*): rusaknya hutan berarti hilangnya sumber Air Panas Sipoholon dan berkurangnya kenyamanan wisatawan<sup>20</sup>. UMKM beralih ke kemasan ramah lingkungan dan memastikan limbah produksi tidak mencemari permukiman sekitar. Dekranasda mulai memperkenalkan pewarna alami dari tanaman lokal untuk produksi Tenun Ulos. Akademisi melakukan riset lapangan mengenai *carrying capacity* destinasi di kawasan perbukitan guna mencegah degradasi ekologis jangka panjang.

### 3. Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata

Temuan lapangan mengkonfirmasi beroperasinya model collaborative governance yang mencerminkan pendekatan *Penta-Helix*. Kerja sama tripartit antara pemerintah (regulator), masyarakat (pendukung) dan pelaku usaha (operator) terlihat nyata dalam penyelenggaraan festival tahunan: pemerintah menyediakan panggung dan fasilitas, masyarakat menjaga keamanan dan suasana, pelaku usaha menyediakan konsumsi dan oleh-oleh. Dekranasda menjalin kemitraan *multi-stakeholder* dengan Dinas Pariwisata (promosi), bank (permodalan perajin) dan desainer nasional (pengembangan motif). Akademisi berperan sebagai *knowledge producer* dalam forum konsultasi publik RIPPARDA.

Masyarakat menyadari bahwa keberlanjutan wisata bergantung pada keadilan akses ekonomi. Ketimpangan antara pelaku usaha besar dan warga kecil berpotensi memicu konflik sosial, sehingga kesepakatan distributif dalam pengelolaan pariwisata menjadi prasyarat mutlak. Gotong royong berfungsi sebagai motor penggerak operasional pariwisata yang mengintegrasikan peran pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai pengelola dan masyarakat sebagai penjaga nilai<sup>21</sup>.

### 4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung: (1) kekayaan potensi wisata alam, budaya dan religi yang beragam; (2) posisi strategis Kabupaten Tapanuli Utara dalam kawasan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas nasional; (3) kuatnya modal sosial berbasis nilai gotong royong dan sistem

<sup>19</sup> Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 4 No. 1, 2016.

<sup>20</sup> United Nations Environment Programme, *Making Tourism More Sustainable*, 2005.

<sup>21</sup> Richard Butler, "Tourism Carrying Capacity and Sustainable Development," *Tourism Recreation Research*, 1996.



kekerabatan Batak Toba (*Dalihan Na Tolu*); (4) sinergi kolaboratif lintas pemangku kepentingan dalam kerangka *collaborative governance*; (5) pemulihan tren kunjungan wisatawan pascapandemi yang membuka peluang pertumbuhan.

Faktor penghambat: (1) keterbatasan anggaran daerah untuk pengembangan infrastruktur secara menyeluruh; (2) koordinasi antar lembaga pemerintah yang belum optimal sehingga pembangunan masih bersifat parsial; (3) kualitas SDM pariwisata yang masih rendah di sebagian wilayah; (4) pengelolaan lingkungan dan sanitasi yang belum sepenuhnya sistematis; (5) partisipasi masyarakat yang masih bersifat pasif dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan kebijakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan intervensi yang bersifat multidimensional mencakup pembangunan infrastruktur fisik, regulasi protektif, fasilitasi kapasitas UMKM dan promosi wisata berbasis budaya, dengan peran sebagai fasilitator, katalisator, sekaligus pengarah sistem; (2) implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan telah menghasilkan dampak positif pada dimensi ekonomi (*multiplier effect*, reduksi urbanisasi), sosial-budaya (revitalisasi Tenun Ulos dan kesenian tradisional Batak Toba), serta lingkungan (*internalisasi eco-literacy* masyarakat); dan (3) faktor pendukung utama berupa potensi wisata yang kaya, modal sosial gotong royong dan sinergi *collaborative governance*, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta rendahnya kapasitas SDM pariwisata di sebagian wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahkamil Hakim and Kata Kunci. (2024). "Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals ( SDGs ) Di Kawasan Danau Toba." 7, no. 1: 419–33.
- Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. (2020). *Integrated Tourism Master Plan Danau Toba*.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. (2024). *Statistik Pariwisata Sumatera Utara 2024*.
- Bejo Mulyadi and Zulkhaidir Pohan. (2022). "No Title." 10, no. 1: 47–66.
- Butler, Richard. (1996). "Tourism Carrying Capacity and Sustainable Development." *Tourism Recreation Research*.
- Dredge, Dianne dan John Jenkins. (2007). *Tourism Planning and Policy*. Australia: John Wiley & Sons, hlm. 12–18.
- Hall, C. Michael. (2008). *Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships*, 2nd Edition. England: Pearson Education, hlm. 220–230.
- Hunter, Colin. (1997). "Sustainable Tourism as an Adaptive Paradigm." *Annals of Tourism Research*, Vol. 24 No. 4, hlm. 850–867.
- Kadek Surya Andika Putra. (2023). "Tantangan Pengembangan Pariwisata Danau Toba Di." *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4: 31–38.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pengembangan UMKM Pariwisata Berkelanjutan*.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2012). *Pedoman Kelompok Sadar Wisata dan Sapta Pesona*.
- Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga. (2016). "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 4 No. 1, 79–96.
- United Nations Environment Programme. (2005). *Making Tourism More Sustainable*.



- United Nations World Tourism Organization. (2015). *Sustainable Development of Tourism Programme*.
- United Nations World Tourism Organization. (2018). *Tourism and Local Community Development*.
- Yoeti, Oka A. (2008). *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, hlm. 67–70.
- Yoeti, Oka A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 45–52.